

KOMISI III DPR RI

Analisis

PAGU ANGGARAN

2025

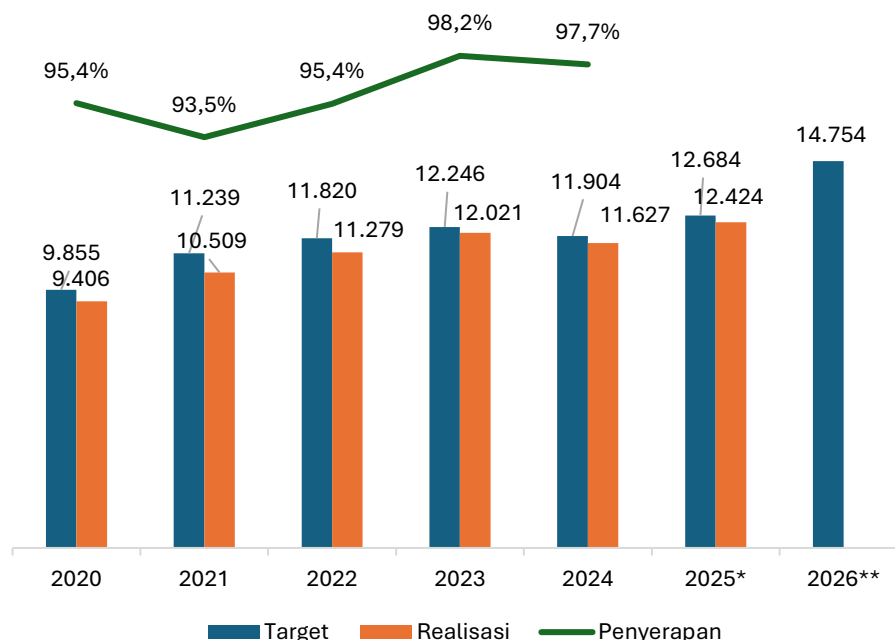
Pagu Anggaran Mahkamah Agung 2026: Perlu Upaya Peningkatan *Rule of Law Index* dan Kesejahteraan Panitera

Kinerja Anggaran MA

Selama periode 2020–2025, anggaran Mahkamah Agung (MA) menunjukkan **tren peningkatan yang konsisten**. Pada tahun 2020, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp9.406 miliar, kemudian meningkat bertahap hingga Rp12.684 miliar pada 2025. Proyeksi RAPBN 2026 bahkan menunjukkan peningkatan lebih lanjut menjadi Rp14.754 miliar. Kenaikan anggaran ini mencerminkan adanya **penguatan dukungan negara terhadap peran**.

Dari sisi penyerapan, kinerja MA juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Selama periode 2020–2024, rata-rata tingkat penyerapan anggaran mencapai 95,9%, dengan tren relatif stabil di atas 93%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar **alokasi anggaran berhasil direalisasikan sesuai rencana**, sekaligus mencerminkan kapasitas manajerial MA dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.

Gambar 1. Perkembangan Anggaran (Miliar Rupiah)



*) Realisasi outlook

**) RAPBN TA 2026

Sumber: LKPP 2020-2024, Nota Keuangan APBN TA 2025, Nota Keuangan RAPBN TA 2026

Jika ditelaah lebih rinci pada tingkat program, alokasi anggaran Mahkamah Agung (MA) dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 memperlihatkan tren peningkatan anggaran program yang cukup signifikan dibandingkan APBN 2025. **Program Dukungan Manajemen meningkat sebesar 16,4%**, dari Rp12.505,4 miliar (2025) menjadi Rp14.554,9 miliar (2026). Kenaikan ini menunjukkan adanya prioritas penguatan kelembagaan, efisiensi manajerial, serta dukungan operasional yang lebih besar bagi MA dalam menjalankan fungsi administrasi peradilan secara modern dan terintegrasi. Sementara itu, **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum juga mengalami peningkatan sebesar 11,2%**, dari Rp178,8 miliar pada 2025 menjadi Rp198,9 miliar pada 2026. Peningkatan ini menandakan adanya perhatian lebih besar terhadap kualitas

pelayanan hukum, termasuk penyelesaian perkara, penguatan integritas hakim, serta akses masyarakat terhadap keadilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Tabel 1. Anggaran Per Program (Miliar Rupiah)

PROGRAM	2025	2026	%
Dukungan Manajemen	12.505,4	14.554,9	16,4
Penegakan dan Pelayanan Hukum	178,8	198,9	11,2
TOTAL	12.684,2	14.753,8	16,3

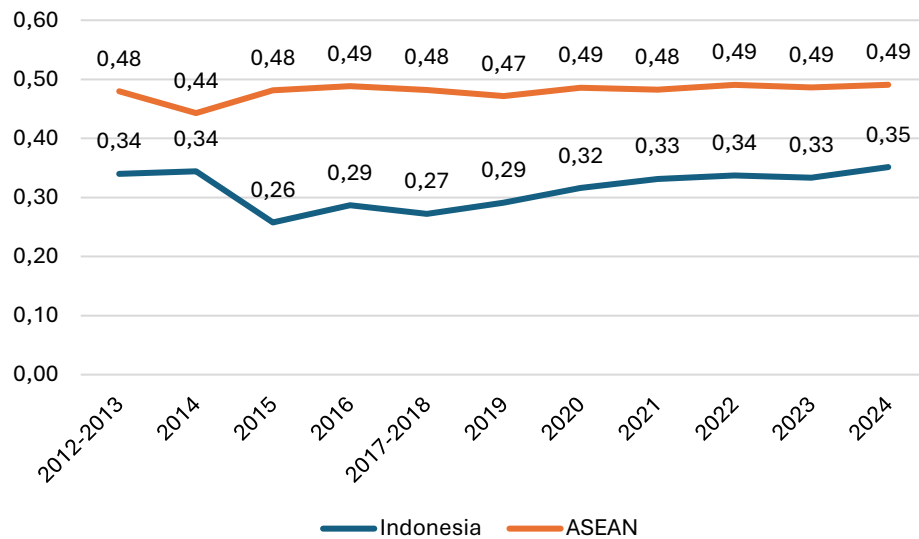
Sumber: Nota Keuangan APBN TA 2025, Nota Keuangan RAPBN TA 2026

Rule of Law Index 2012-2024

Grafik *Rule of Law Index* memperlihatkan bahwa selama periode 2012–2024 **integritas aparat peradilan Indonesia menunjukkan tren perbaikan**, dari skor terendah 0,26 (2015) hingga mencapai 0,35 (2024). Peningkatan ini menandakan adanya hasil positif dari berbagai upaya reformasi peradilan, termasuk penguatan transparansi, pengawasan internal, serta digitalisasi proses di Mahkamah Agung. Meskipun demikian, capaian Indonesia masih berada di bawah rata-rata ASEAN yang relatif stabil di kisaran 0,48–0,49, sehingga menggambarkan masih adanya persepsi publik terkait potensi penyalahgunaan jabatan di lingkungan yudisial.

Dalam situasi ini, Mahkamah Agung memegang peran kunci untuk mempercepat penguatan integritas melalui reformasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterbukaan informasi. Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan gaji hakim pada 2024 dan rencana 2025 merupakan langkah strategis yang dapat menjadi fondasi penting bagi peningkatan profesionalisme hakim. Namun peningkatan kesejahteraan tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kinerja hakim. Dengan sinergi antara kesejahteraan dan integritas, Mahkamah Agung tidak hanya berpeluang memperbaiki posisi Indonesia dalam indeks internasional, tetapi juga berperan **membangun peradilan yang benar-benar dipercaya masyarakat sebagai benteng terakhir pencari keadilan dan pilar utama tegaknya negara hukum**.

Gambar 2. Skor Rule of Law Cabang Yudikatif



Sumber: World Justice Project, 2025

Fokus Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Hakim Perlu Diikuti Peningkatan Kesejahteraan Panitera

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan skema gaji pokok dan tunjangan hakim melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hakim sekaligus mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan akuntabel. Belum berselang lama sejak kebijakan tersebut berlaku, Presiden Prabowo Subianto kembali mengumumkan rencana kenaikan gaji pokok hakim secara signifikan hingga mencapai 280 persen. Kebijakan ini merupakan langkah progresif Pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan terkait integritas dan kinerja hakim, yang selama ini kerap dikaitkan dengan rendahnya kesejahteraan serta besarnya beban kerja hakim.

Namun, peningkatan kesejahteraan hakim perlu dibarengi juga dengan aparatur pendukung seperti panitera yang memiliki peran krusial dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan peradilan. Peningkatan kesejahteraan bagi panitera akan berkontribusi langsung terhadap kualitas kerja peradilan, mengingat mereka merupakan garda depan dalam proses administrasi perkara dan berinteraksi langsung dengan para pencari keadilan.

Dengan perbaikan signifikan pada aspek kesejahteraan hakim yang disertai perhatian terhadap aparatur pendukung, diharapkan dampaknya tidak hanya meningkatkan kualitas hidup dan profesionalisme, tetapi juga **mendorong integritas dan independensi peradilan secara lebih menyeluruh**. Pada akhirnya, langkah ini akan memperbaiki persepsi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Pengarah

Plt. Kepala Badan Keahlian DPR
Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA, PQIA

Penulis

Tio Riyono, S.E.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Fachry Ali Firdaus, S.E.



Analisis

PAGU ANGGARAN

2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id**